

AGENDA PEREMPUAN DALAM GERAKAN PETANI

Tim LPTP Solo

Abstract: The green revolution, capitalism, neo-liberalism to corporate farming is a symbol of global forces that gave birth to unfairness for farmers especially women farmers. Even the injustice inflicted by global forces are increasingly marginalize women when in households, gender relations are constructed showing the existence of gender inequality. Therefore, the agenda must be in stretcher by the movement of women farmers should pay more attention to the unequal gender relations in the life of farmer households.

Kata Kunci: Globalisasi, relasi gender dan petani perempuan.

PENDAHULUAN

Petani perempuan, ternyata selama tiga dekade terakhir tidak pernah terbebas dari proses marginalisasi, dominasi dan kekerasan. Belum lagi sembuh dari penderitaan akibat kekerasan dan marginalisasi yang ditimbulkan oleh Kebijakan pertanian “Revolusi Hijau”, petani Perempuan saat ini tengah menghadapi bencana baru dari kebijakan pertanian Kapitalistik di era Globalisasi. Revolusi Hijau sebagai pendekatan pertanian paska Kolonialisme, saat ini sesungguhnya tengah mengalami kebangkrutan, akibat penolakan banyak pihak karena akibat negatif yang ditimbulkannya terhadap degradasi penghidupan, budaya dan lingkungan hidup petani. Namun, celakanya ada indikasi yang menunjukkan bahwa kita tidak belajar dari kegagalan Revolusi Hijau. “Corporate Farming” yang diajukan sebagai pengganti Revolusi Hijau, merupakan kebijakan pertanian yang akan berakibat lebih negatif bagi petani perempuan, dan akan sangat berpengaruh secara radikal bagi kehidupan petani. Persoalannya siapa yang akan diuntungkan, relasi kekuasaan apa yang akan timbul dan bagaimana dampaknya terhadap petani perempuan, adalah pertanyaan pokok yang harus diajukan sebagai bagian dari refleksi atas kegagalan Revolusi Hijau.

Dalam tulisan ini saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana secara umum “persoalan gender” dalam agenda gerakan petani dewasa ini?. Untuk menjawabnya, saya perlu melakukan analisis seputar bagaimana implikasi kebijakan pertanian Globalisasi saat ini terhadap nasib petani perempuan. Namun untuk menjawabnya perlu diawali dengan melihat bagaimana nasib petani perempuan akibat kebijakan Revolusi Hijau sebagai kebijakan sebelumnya. Akhirnya melalui tulisan ini saya ingin mengajukan saran tentang bagaimana petani perempuan dalam gerakan petani secara realistik merespon pandangan, kebijakan dan praktek pertanian saat ini.

PEMBAHASAN

A. Petani Perempuan : Di Tengah Gelombang Modernisasi dan Globalisasi

1. Era Revolusi Hijau : Tergusurnya Petani Perempuan dari Sawah

Revolusi Hijau bagi saya tidak lebih dari suatu bentuk industrialisasi dan modernisasi pertanian yang sepenuhnya menganut logika pertumbuhan. Sebagai bagian dari paham modernisasi, Revolusi Hijau tidaklah sekedar program pertanian, melainkan suatu strategi perubahan sosial untuk

*. LPTP atau Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan yaitu sebuah lembaga yang konsern terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

mengganti paradigma pertanian tradisionalisme. Selama empat puluh abad pengetahuan pertanian rakyat untuk pertama kalinya menghadapi penggusuran. Dan untuk pertama kalinya pula dalam sejarah pertanian manusia, suatu model pertanian yang dipelopori oleh pengusaha multinational, melakukan homogenisasi dari berbagai ragam pengetahuan pertanian manusia dan direduksi menjadi satu pola bentuk pertanian. Program yang didukung oleh pusat penelitian global raksasa seperti *International Rice Research Institute (IRRI)* di Philipina dan *International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)* di Mexico benar-benar mengubah wajah pertanian dunia. Dewasa ini di dunia terdapat 13 lembaga riset sejenis dikembangkan oleh *Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR)* yang menjadi tulang punggung program Revolusi Hijau. Akibatnya, Kebudayaan petani yang telah hidup selama 5000 tahun memproduksi, menseleksi, menyimpan, dan menanam kembali benih mereka, secara dramatik dimusnahkan.

Benih, ternyata telah menjadi komoditi komersial dan privat dan menjadi sesuatu yang diperebutkan. Saya dapat merasakan bagaimana Revolusi Hijau telah merampas kontrol atas benih padi dari tangan petani perempuan ke teknokrat di IRRI, dan Perusahaan bibit multinasional. Benih, ternyata menjadi salah satu sumber keuntungan dan kontrol. Masalahnya, benih unggul 'ajaib' yang mereka ciptakan dan dipaksakan kepada petani ternyata keajaiban komersial. Benih-benih ini akan kembali ke sifat aslinya apabila ditanam kembali secara berulang-ulang oleh petani, karena itu setiap musim tanam petani harus membelinya untuk tetap mendapatkan padi 'unggul'. Petani menjadi sangat tergantung pada industri benih. Petani perempuan yang dulunya menjadi penjaga benih, tidak bisa lagi mengontrol dan mereproduksi benih itu sendiri. Revolusi Hijau telah menggusur tidak saja ribuan jenis atau varietas tradisional tetapi juga merampas keseluruhan tanaman padi yang asal mulanya berada di tangan petani perempuan di desa.

Selain merampas bibit dan menggusur kebudayaan penyemaian bibit, Revolusi Hijau juga telah melanggengkan penindasan terhadap petani perempuan secara sistematis. Banyak studi menunjukkan, bagaimana petani perempuan disingkirkan dari dunia pertanian. Mekanisasi pertanian yang diperkenalkan oleh Revolusi Hijau menggusur petani perempuan dari sektor pertanian. Kaum perempuan tidak hanya tergusur dari peran mereka di sawah, asumsi bahwa petani adalah lelaki dan lelaki adalah pemimpin rumah tangga, telah mengakibatkan banyak informasi tentang program ini tidak menyentuh kaum perempuan, dan akibatnya terjadilah peminggiran petani perempuan. Ketika kritik dilancarkan terhadap Revolusi Hijau. Sebagai jawaban, mereka melontarkan apa yang dikenal dengan *Women in Development (WID)*, namun program tersebut justru melahirkan regulasi ketimbang pembebasan kaum petani perempuan. Asumsi mereka bahwa petani perempuan mundur disebabkan tidak terlibat dalam pembangunan pertanian, mengingkari kenyataan bahwa sesungguhnya petani perempuan justru digusur dari bidang produktif.

Bagaimana petani perempuan dikorbankan oleh Revolusi hijau? Di Jawa misalnya, secara tradisional petani perempuan memiliki peran penting dalam produksi, khususnya selama musim panen dan musim tanam. Petani perempuan, khususnya dari keluarga miskin, menghidupi keluarga mereka dengan mendapatkan pekerjaan selama panen. Masa panen telah menyumbangkan pemasukan yang berarti bagi petani perempuan di rumah tangga mereka. Dalam tradisi pertanian, kerja petani perempuan sangatlah penting, tidak saja lamanya mereka bekerja, tapi juga intensitas mereka. Tapi sejak Revolusi Hijau, tipe padi dan teknologi baru yang dikenalkan secara sistematis telah mengabaikan dan menggusur peran dan pekerjaan petani perempuan. Karena meskipun total input tenaga diakui lebih tinggi petani perempuan dibanding petani lelaki, namun teknologi yang diciptakan yang memudahkan dikontrol oleh petani lelaki, maka proses penggusuran petani perempuan pun tak terhindarkan. Untunglah saat ini Revolusi Hijau tengah mengalami krisis seiring dengan krisis pembangunan. Pertanyaan penting disini adalah, apakah kebijakan pertanian dimasa datang sebagai penggantinya akan berdampak positif bagi petani perempuan? Untuk menganalisisnya, perlu dipahami dahulu, apa dan bagaimana kebijakan pertanian dimasa datang?.

2. Era transisi ke Pertanian Kapitalisme

Petani pada era ini, tengah memasuki masa transisi menuju Globalisasi, yakni proses pengintegrasian ekonomi nasional kedalam ekonomi global. Sejak ditandatanganinya kesepakatan internasional tentang perdagangan April 1994, di Marrakesh, Maroko, yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), sesungguhnya Globalisasi telah dimulai. GATT selain kumpulan aturan mengenai perdagangan, juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah dan pengadilan dimana jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa bisa diselesaikan. Kesepakatan itu dibangun diatas asumsi bahwa sistim dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistim proteksionis, dan “persaingan bebas” akan menguntungkan mereka yang efektif dan efisien.

Perusahaan Perusahaan transnasional (TNCs) sesungguhnya berada dibalik proses ini, karena mereka yang paling akan diuntungkan. Selama dua dasa warsa menjelang berakhirnya Millenium, jumlah TNCs meningkat secara pesat dari sekitar 7000 ditahun 1970, dan tahun 1990, jumlah itu telah mencapai 37,000. Mereka berhasil menguasai 67% dari perdagangan Dunia, bahkan menguasai 75% dari total investasi global. Ada 100 TNCs, diantaranya bergerak dibidang bibit, pestisida, pupuk kimia, yang dewasa ini menguasai ekonomi Dunia. Mereka mengontrol sampai 75% perdagangan dunia.

Selain perusahaan Transnasional, petani juga berhadapan dengan lembaga Finansial Internasional (IFIs). IFIs merupakan organisasi global yang beranggotakan negara negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara miskin. Ada dua IFIs yang secara global dikenal yakni *The World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF). IMF ini adalah organisasi yang paling berkuasa di abad 20. Organisasi yang berpusat di Washington D.C. ini memiliki misi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian hutang sebagai bantuan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran dengan suatu “kondisionalitas” yang ditentukan. IMF saat ini beranggotakan 182 negara. Namun. Amerika Serikat sesungguhnya yang paling berkuasa atas segala keputusan IMF, karena negara tersebut memiliki hak voting mencapai 17.8% selain Amerika Serikat tidak ada yang memiliki hak voting lebih dari 6%. Sementara mayoritas negara anggota hanya memiliki kurang dari 1%. Padahal mula dicetuskan oleh Keynes dan Dexter, melalui persepakatan “*Bretton Woods*” IMF bertujuan “untuk menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik kapital internasional yang dituduh bertanggung jawab atas resesi tahun 1930an.

Bank Dunia juga tidak kalah berperannya. Badan ini terdiri atas empat lembaga keuangan yang saling berkaitan, yakni bank Internasionaional untuk Rekonstruksi (IBRD) Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Korporasi keuangan Internasional (IFC) dan Lembaga penjamin Investasi Bilateral (MIGA). Bank Dunia mempunyai misi sebagai lembaga internasional yang membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Namun berbagai program Bank Dunia seperti “*Structural Adjustment Program*” misalnya, telah mengingkari misi utamanya “sebagai lembaga demokratis yang membantu mengurangi kemiskinan”.

Sebenarnya semua lembaga pendukung model ekonomi Neo Liberal dan pasar bebas, justru menyumbang marginalisasi jutaan petani miskin secara global. Misalnya kebijakan IMF tentang Liberalisasi perdagangan dan penghapusan quota dan tariff, privatisasi perusahaan negara, privatisasi lahan pertanian dan agribisnis, membawa dampak negatif terhadap petani marginal.

Pada tahun 1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia yang dikenal dengan *World Trade Organizations* (WTO) didirikan, dan sejak saat itu dia mengambil alih fungsi GATT. WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara negara yang tidak mematuhi GATT. Akan tetapi WTO akan bertindak berdasar komplain yang diajukan oleh anggotanya. Dengan demikian WTO merupakan salah satu aktor dan arena forum perundingan antar perdagangan dari mekanisme Globalisasi yang terpenting. Jika WTO adalah forum kesepakatan perdagangan tingkat Global, maka ditingkat regional forum serupa untuk menetapkan kebijakan perdagangan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area yang lebih kecil, misalnya *The*

North American Free Trade Agreement (NAFTA) antara Amerika Serikat dan Mexico, tapi juga ada kesepakatan yang bersifat regional seperti the Asia Pacific Economic Conference (APEC). Bahkan ada kesepakatan area pertumbuhan yang lebih kecil lagi seperti segitiga pertumbuhan Singapore, Johor dan Riau (SIJORI) ataupun Brunai, Indonesia, Malaysia and Philippines East Growth Area (BIMPEAGA). Bahkan kawasan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil, seperti Otorita Batam, adalah bentuk terkecil dari kesepakatan dagang yang memiliki kesepakatan kebijakan tersendiri dan otonom. Kesemua merupakan forum forum seperti WTO dalam skala yang lebih kecil dan lokal.

Sementara itu ada mekanisme dan struktur ekonomi yang dikembangkan selain forum perundingan tersebut dalam sistem Globalisasi, yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan janjinya sebagai proses ekonomi global untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia secara global. Penciptaan mekanisme Globalisasi Sistem dan proses Produksi. Konsolidasi sistem fabrikasi dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan hirarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari TNCs. Proses ekspansi sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian Zone Proses ekspor (*Export Processing Zone* atau EPZs). EPZ adalah suatu wilayah negara yang dikhususkan sebagai ekspor industri dengan syarat mampu dan mau mengembangkan *duane* minimal yang menyangkut aturan perburuhan dan pajak Domestik sehingga menjadi daya tarik TNCs untuk beroperasi. EPZs tersebut juga dikembangkan di berbagai wilayah negara negara Dunia Ketiga yang memiliki standar upah buruh murah, karena negara negara itu tengah mencari investasi dan perlu uang dari ekspor. Itulah makanya sebagian besar tenaga kerja wilayah EPZs ini adalah buruh perempuan. Mirip dengan strategi EPZ adalah yang dikenal dengan *Global Labour Force*, dikembangkan melalui spesialisasi dan menjadi divisi buruh seperti bekerja dalam pabrik berskala global, yang dikembangkan melalui konsep *International Division of Labour*.

Dari penjelasan singkat di atas kita sadar, ada aktor-aktor yang sangat menentukan. Mereka adalah, Lembaga Finansial Internasional (IFIs) dan TNCs. TNCs sangat berkepentingan melalui mekanisme Globalisasi sistem produksi, investasi dan pasar yang mekanismenya ditetapkan di WTO. Forum WTO pada hakekatnya menjadi arena perjuangan bagi TNCs untuk memperjuangkan cita cita mereka menguasai dunia. Hal itu berarti, semua proses dan mekanisme Globalisasi merupakan perebutan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan negara ke TNCs. Mekanisme Globalisasi, adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kedalam sistem ekonomi dunia melalui mekanisme TNCs, yang dengan dukungan negara negara yang diuntungkan, membentuk dewan perserikatan perdagangan global, WTO dan lembaga keuangan Global, IMF dan Bank Dunia.

Masih dalam wacana di atas, para aktor Globalisasi, selain menetapkan aturan-aturan seputar investasi, *Intellectual Property Rights* dan kebijakan internasional lainnya juga mendesak, mempengaruhi dan memaksa negara-negara melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya untuk memperlancar pengintegrasian ekonomi nasional kedalam ekonomi global. Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara memaksa merubah semua aturan, kebijakan yang menghalangi ketiga aktor globalisasi, terutama TNCs untuk beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar maupun ekspansi investasi. Oleh karena itu, sesungguhnya, globalisasi tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial di negara Dunia Ketiga, melainkan lebih didorong motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global.

3. Neo-Liberalisme dan Mitos Pasar Bebas: Dimana Posisi Perani Perempuan?

Semua mekanisme dan proses Globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor aktor Globalisasi yakni TNCs, Bank Dunia dan IMF melalui kesepakatan yang dibuat di WTO, sesungguhnya dilandaskan pada ideologi Neo Liberalisme. Neo-Liberalisme secara prinsipil tidak ada bedanya dengan Liberalisme yang lama, hanya saja karena waktu timbulnya serta konteks pemunculannya kembali serta skala dan strateginya berbeda karena menjawab persoalan yang berlainan. Dengan demikian Neo-Liberalisme merupakan kembalinya paham Liberalisme lama di era yang baru.

Penganut paham ekonomi Neo Liberalisme, percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai akibat “kompetisi bebas.” Kompetisi yang sehat tumbuh akibat kepercayaan bahwa “pasar Bebas” itu efisien. Pendeknya, itulah cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang makin langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Harga barang dan jasa selanjutnya menjadi indikator apakah sumber daya telah habis atau masih banyak. Harga murah, itu berarti persediaan memadai. Namun jika produk mulai langka, hargapun naik. Jika harga tinggi, tentu orang akan menanam modal kesana. Oleh sebab itu harga menjadi indikasi apa yang harus diproduksi. Itulah maknanya mengapa penganut Neo-Liberal tidak ingin pemerintah ikut campur, serahkan saja pada mekanisme dan hukum pasar. Keputusan individual atas interest pribadi akan dapat bimbingan dari “*invisible hand*”, sehingga masyarakat akan mendapat berkah dari putusan para individu tersebut. Pada akhirnya, toh kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang tersebut akan “*trickle down*” kepada anggota masyarakat lain. Oleh karena itu sedikit orang istimewa tersebut perlu difasilitasi dan dilindungi. Pendirian Neo-Liberal tersebut sesungguhnya tidak jauh beda dengan paham Liberalisme yang dipikirkan Adam Smith dalam “*The Wealth of Nations* (1776).” Krisis berkepanjangan yang menimpa Kapitalisme abad awal 19, yang berdampak depresi ekonomi tahun 30an berakibat menenggelamkan Liberalisme, dan akibatnya pendulum beralih memperlebar peran pemerintah, sejak Roosevelt dengan “*New Dealnya*” tahun 1935 peran pemerintah dalam ekonomi sangatlah kuat. Tetapi, karena pertumbuhan Kapitalisme selanjutnya hingga awal abad 20 menjadi lambat, dan yang dianggap sebagai penyebab utamanya adalah campur tangan pemerintah yakni: proteksi, selain paham keadilan sosial, kesejahteraan bagi rakyat dan berbagai tradisi adat pengelolaan sumberdaya alam berbasis rakyat dan sebagainya. Untuk itu Kapitalisme memerlukan suatu strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan “akumulasi kapital”. Strategi itu adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi, pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, Penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan “civil society” dan anti korupsi, yang kesemuanya dianggap sebagai penghambat pasar bebas. Untuk itu diperlukan suatu tatanan baru perdagangan global, dan sejak itulah gagasan Globalisasi dimunculkan.

Pendirian Neoliberalisme sebenarnya tidak jauh dari kebijakan Pasar bebas, pilihan konsumen, penghargaan atas tanggung jawab personal dan inisiatif kewiraswastaan, serta menyingkirkan birokrat “parasit” pemerintah, yang tidak akan pernah mampu meskipun dikembangkan. Aturan dasar kaum Neoliberal adalah, “Liberalisasikan perdagangan dan finance. “Biarkan pasar menentukan harga”, akhiri inflasi, stabilisasi ekonomi-makro, dan Privatisasi. Pemerintah haruslah “menyingkir dari menghalangi jalan.” (Chomsky, 1999). Paham ini dipaksakan secara Global, sehingga terciptalah suatu tata dunia. Arsitek dari tata dunia ini adalah ditetapkan dalam “Konsensus Washington,” oleh para pembela Ekonomi privat terutama wakil dari TNCs yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Secara lebih spesifik, pokok pendirian neoliberal meliputi: *Pertama*, bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah, yakni hindarkan pemerintah campur tangan dibidang perburuhan, investasi, harga serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri, dengan menyediakan kawasan pertumbuhan, seperti Otorita Batam, NAFTA, SIJORI dan lain sebagainya. *Kedua*, hentikan subsidi negara kepada rakyat karena hal itu bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh karena itu pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik negara, karena perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada rakyat, dan itupun menghambat persaingan bebas. *Ketiga*, hapuskan ideologi “kesejahteraan bersama” dan pemilikan komunal seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat “tradisional”. Paham kesejahteraan dan pemilikan bersama mereka yakini menghalangi pertumbuhan. Akibat dari prinsip tersebut adalah serahkan “management” sumber daya alam pada ahlinya, dan bukan kepada masyarakat “tradisional” (sebutan bagi masyarakat adat) karena mereka dianggap tidak mampu mengelola Sumber daya Alam secara efisien dan efektif.

4. Ancaman Corporate Farming bagi Petani Perempuan.

Sejak ditandatangani kesepakatan GATT, ekonomi dunia sesungguhnya telah memihak pada kepentingan perusahaan TNCs. Kesepakatan tersebut secara teoritik berhasil memaksakan keinginan mereka untuk mendesak terjadinya reformasi kebijakan nasional dalam berbagai bidang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Neo liberalisme, atau kebijakan yang menghambat ekspansi kapital, ekspansi investasi, proses produksi dan pemasaran global. Berbagai kebijakan negara harus direformasi termasuk kebijakan dibidang pertanian, perpajakan dan investasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu cara mereka untuk memaksa reformasi tersebut dilakukan dengan dikaitkan sebagai syarat “hutang” bagi Bank Dunia melalui *Structural Adjustment Program*. Agaknya, reformasi kebijakan dimaksud sebagai pelicin “jalan” dan perlindungan kepada TNCs untuk beroperasi dalam rangka memudahkan bagi mereka untuk “relokasi industri” dan mendapatkan buruh murah.

Implikasi perubahan kebijakan nasional yang memihak kepentingan TNCs ini akan memarginalkan petani, pedagang kecil, nelayan dan masyarakat adat dalam hal perebutan sumber daya alam terutama tanah, hutan dan laut. Diperkirakan masalah tanah yang dihadapi oleh petani kecil dimasa mendatang akan menjadi semakin pelik. Hal ini karena pada fase *Free Trade*, dalam rekayasa GATT pada dasarnya dimaksudkan lebih untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi TNCs bidang Agribisnis untuk melakukan investasi, produksi dan berdagang komoditi pertanian tanpa regulasi atau tanggung jawab sama sekali. Sementara itu kecenderungan semakin lemahnya negara Dunia Ketiga untuk menerima perubahan kebijakan mengenai tanah, pajak, investasi telah memudahkan TNCs beroperasi. Ini semua sejalan dengan cita-cita Neoliberalisme, yang pada dasarnya semangat untuk menggantikan peran petani perempuan oleh TNCs sebagai penghasil pangan (Vandana Shiva, 1995: 4). Dalam prakteknya, kebijakan ini berbentuk pengembangan agribisnis pertanian dengan cara melakukan konsolidasi lahan hamparan dari lahan-lahan kecil petani kecil sebagai “saham” yang dikelola secara profesional dalam sistem industri pemroduksi pangan. Konsep *corporate farming* tersebut akan berakibat pengusiran berbagai keanekaragaman budaya, pengetahuan, bibit serta habitat pertanian yang selama ini menjadi tempat bergantung bagi kehidupan jutaan petani.

Dengan demikian, melalui kebijakan pertanian *Corporate Farming*, telah memperlicin jalan bagi perusahaan agribisnis untuk menguasai sumberdaya alam “kehidupan” petani secara mudah. Kebijakan yang bersandar pada liberalisasi perdagangan pangan ini, bagi petani merupakan fenomena marginalisasi, terutama petani perempuan, karena peran mereka sebagai penghasil pangan akan diakhiri. Dengan kata lain kebijakan Pertanian yang berorientasi dan mendorong ekspor dan impor hasil pertanian secara bebas akan menggeser kemampuan petani lelaki dan perempuan sebagai penghasil pangan lokal. Kebijakan Neoliberal untuk menghapus subsidi kepada petani dan menghapus tarif hasil pertanian, dalam rangka kompetisi bebas antara petani kecil dengan TNCs pertanian, akan berakibat bagi petani tak sanggup bersaing dan mereka akan segera gulung tikar. Studi FAO tentang dampak implementasi kesepakatan pertanian “Uruguay Round” terhadap petani di 16 negara berkembang menunjukkan terjadinya trend semakin terjadi konsentrasi pertanian, dan ini berakibat pada marginalisasi petani kecil, meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan.

Dengan kebijakan “akses pasar” dan “domestic support” terhadap perusahaan agribisnis karena alasan persaingan global ini akan memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan dari subsidi bagi petani kecil menjadi subsidi kepada perusahaan agribisnis raksasa, dan proses ini sekaligus menggusur kemampuan petani kecil sebagai produsen. Kebijakan *corporate farming*, bahkan akan mempercepat proses transformasi pertanian dari kapitalisme kecil di pedesaan menuju ke industri pertanian perusahaan raksasa. Ini berarti akan terjadi proses perubahan radikal di sektor pertanian, dari petani kecil menjadi buruh industri agribisnis yang dikelola oleh para manajer produksi profesional dalam suatu relasi kerja dan sistem kerja industrial.

Akibat yang akan ditimbulkan oleh transformasi menuju proses produksi kapitalistik, akan menyingkirkan segenap budaya pertanian yang meletakkan petani sebagai subyek ekonomi dan

produksi. Dimana petani dan petani perempuan memproduksi dan menjaga bibit-bibit padi mereka serta mereproduksinya. Akibatnya selanjutnya, petani kecil tidak ada pilihan lain kecuali melepaskan sumber alam terutama tanah mereka. Dampak negatif ini, pada akhirnya akan menimpa petani perempuan. Dengan demikian petani perempuan sesungguhnya sudah dikorbankan sejak zaman Revolusi Hijau, hingga zaman globalisasi.

B. Agenda Gerakan Petani Perempuan: Menguak Mitos

Sejak Globalisasi dicanangkan, sesungguhnya korban dikalangan petani lelaki dan perempuan telah mulai berjatuh. Namun bersamaan dengan itu, saat ini juga tumbuh berbagai gerakan resistensi terhadap Globalisasi dan Neoliberalisme. Misalnya saja gerakan “new Social Movement” petani menentang pembangunan Dam di beberapa tempat di Asia. Gerakan anti proyek pembangunan Narmada Dam di India tahun 1980an, pada dasarnya juga merukan suatu bentuk dari “New Social Movement”. Pada tahun 1992, Gerakan untuk menyelamatkan Narmada ini berhasil mendesak Bank Dunia untuk mencabut dukungannya terhadap proyek tersebut. Gerakan yang mewarisi sikap Kritis Mahatma Gandhi ini, adalah gerakan sosial yang menentang watak otoriterian kekuasaan negara dan sikap ekstraktif dari proses ekonomi yang dominan. New Social “peasant” Movement terus tumbuh baik dalam skala lokal, nasional, bahkan global. Misalnya, Gerakan Pembaharuan Agraria yang dikembangkan oleh Serikat Petani Sumatra Utara dan Konsorsium Pembaharuan Agraria, serta Gerakan Petani Ramah Lingkungan dan petani PHT.

Masih dalam wacana di atas, banyaknya kelompok petani saat ini, sebenarnya untuk memperjuangkan hak hak petani (Peasant Rights) dan juga merupakan gerakan sosial resistensi terhadap Neoliberalisme. Dengan demikian resistensi terhadap globalisasi sesungguhnya juga datang dari gerakan petani akar rumput. Meskipun tidak semua gerakan petani anti Neoliberalisme, namun berkembangnya gerakan petani yang lahir sebagai keprihatinan terhadap penghancuran lingkungan pedesaan, justru karena hal itu akan menghancurkan kehidupan petani juga semakin berkembang. Contoh lain adalah gerakan masyarakat Chipko (Chipko Movement), yakni gerakan kaum perempuan menentang perusahaan penebangan hutan adalah satu contoh gerakan anti Neoliberalisme yang digerakkan oleh petani perempuan.

Perjuangan petani perempuan ini perlu dilanjutkan untuk menghadapi Globalisasi. Gerakan resistensi petani perempuan memiliki makna strategis karena mereka diperlukan untuk memberi perspektif “perempuan” terhadap Globalisasi dan bentuk pertanian “cororate farming” sehingga terciptalah praktek pertanian yang ramah terhadap petani perempuan, terhadap ekologi dan menjaga keaneka ragaman hayati. Globalisasi perdagangan pangan bahkan mengancam keanekaragaman budaya lantaran kebijakan tersebut berusaha untuk memisahkan antara produsen dan konsumen pangan.

Secara lebih tegas bahkan petani perempuan perlu mendekonstruksi berbagai “mitos” Neoliberalisme tentang liberalisasi perdagangan pangan, dan merebut kembali urusan penyedia pangan ketangan petani perempuan. Berbagai mitos tersebut meliputi: *pertama*, mitos bahwa dengan perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan keamanan panganpun akan terjamin. Realitasnya, perdagangan bebas bidang pangan akan menaikkan harga pangan; *kedua*, mitos bahwa WTO dan TNCs akan memproduksi pangan yang aman. Realitasnya, dengan rekayasa genetika dan penggunaan pestisida dan racun kimia untuk efisiensi berbahaya bagi manusia; *ketiga*, mitos bahwa kaum perempuan akan diuntungkan oleh pasar bebas pangan. Realitasnya, petani perempuan akan tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen; *keempat*, mitos bahwa Hak Patent akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Realitasnya, hak paten dibidang mikro-organisme dan “germplasma”, selain melegalisasi pencurian keanekaragaman hayati petani serta bibit dan menjualnya kembali pada petani demi keuntungan, merupakan proses penghancuran kehidupan petani dan oleh karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia; *kelima*, mitos bahwa perdagangan bebas dibidang pangan akan menguntungkan konsumen karena banyak pilihan dan harga murah. Realitasnya, perdangan bebas bidang pangan akan menguntungkan TNCs dan memarginalkan

negara karena tidak mampu lagi memenuhi kewajiban konstitusinya dalam bidang keamanan dan persediaan pangan, maupun penghancuran petani perempuan sebagai produsen pangan.

Oleh karena itu, sangat strategis apabila petani perempuan senantiasa merebut wacana seperti: "globalisasi dan perdagangan bebas", "corporate farming", ataupun "keamanan pangan" dari pespektif petani perempuan yang lebih berpendirian "kedaulatan pangan", pangan untuk kehidupan dan bukan pangan untuk komoditi dan keuntungan belaka. Akan tetapi yang jadi masalah, jangankan memberi "warna gender" dalam wacana dominan, bahkan masih ada indikasi kuat yang menunjukkan absennya "pertanyaan gender" dibanyak gerakan petani untuk mempertanyakan bagaimana globalisasi dan perdagangan bebas dibidang pangan akan berakibat negatif bagi petani perempuan.

Tanpa mempersoalkan, apa akibat dan implikasi liberalisasi perdagangan pangan dan nasib petani perempuan, maka gerakan petani "berhutang pada petani perempuan". Pendeknya, setiap perjuangan gerakan petani yang tidak menghiraukan akibatnya terhadap perubahan relasi kekuasaan antara petani lelaki dan petani perempuan, gerakan tersebut sesungguhnya belum menuntaskan permasalahan warisan yang telah lama ada di kehidupan petani. Bahkan tanpa mempersoalkan relasi gender terlebih dahulu, gerakan petani tidak saja akan melanggengkan salah satu bentuk ketidakadilan sosial tertua dan oleh karenanya menjadi bagian dari masalah. Sekali lagi tanpa pertanyaan gender, bagi petani perempuan, gerakan petani lebih menjadi masalah ketimbang sebagai solusi. Banyak petani perempuan yang mengeluh justru pada saat mereka telah berhasil bersama-sama petani lelaki melakukan aksi sepihak mereklamasi, merebut kembali tanah mereka, namun karena alasan tradisi yang tidak memungkinkan petani perempuan untuk memiliki tanah, maka gerakan mereka berakhir dengan memarginalisasikan petani perempuan.

Dengan kata lain, tanpa mempertimbangkan implikasi gender, suatu perjuangan dan gerakan petani dalam memperjuangkan hak hak petani, maupun dalam memperjuangkan reformasi agraria, akan melanggengkan ketidakadilan bagi petani perempuan. Bahkan penderitaan yang dialami oleh petani perempuan akibat diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang ditimbulkan akibat dari relasi gender dikalangan petani sama seriusnya dengan yang dirasakan oleh petani perempuan ketika mereka merasakan akibat kejahatan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh Neoliberalisme. Oleh karena itu perlu secara simultan gerakan petani membenahi dan mendemokratisasikan "relasi gender" yang ada dalam gerakan petani, dan yang terpenting melakukan proses demokratisasi relasi gender yang ada di rumah tangga petani.

Banyak kasus menunjukkan, bahwa Organisasi Tani Perempuan tingkat lokal mempunyai peran penting dalam berbagai aksi pengambilan kembali tanah mereka dari perkebunan. Akan tetapi ketika tanah itu harus didistribusikan kembali kepada para petani, betapa kecewanya para petani perempuan karena struktur rumah tangga dan relasi gender para petani yang tidak demokratis dan tradisi masyarakat petani yang tidak memberikan hak bagi kaum perempuan atas tanah, telah mengakibatkan marginalisasi petani perempuan lantaran mereka tidak mempunyai akses dan kontrol atas tanah. Oleh karena itu, tanpa membongkar terlebih dahulu sistem patriarki yang ada di masyarakat petani dan tanpa menata kembali relasi gender di rumah tangga para petani masing masing, setiap gerakan aksi untuk reformasi agraria akan dilumpuhkan oleh ketidakadilan gender yang secara sistematis dan kokoh berada di masyarakat petani. Berangkat dari hal tersebut, sebenarnya agenda yang harus dilakukan lebih dahulu oleh gerakan petani adalah melakukan proses demokratisasi terhadap relasi gender di rumah tangga masing masing sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gerakan untuk memberdayakan dan mencapai hak-hak petani perempuan.

Akhirnya, pergumulan ideologis antara pendukung Neoliberalisme, Globalisasi dan kapitalisme *versus* demokratisasi dan paham keadilan sosial, bukan sekedar pertarungan ideologis di tingkat kebijakan negara dan arena publik *an sich*. Paham demokratisasi dan keadilan sosial mempersoalkan dan menuntut untuk selalu memikirkan implikasi gender dari setiap gagasan perjuangan justru sejak dalam rumah tangga. Kegagalan dalam melakukan demokratisasi terhadap relasi gender antara petani lelaki dan

perempuan dan kegagalan untuk mentransformasikan relasi gender di rumah tangga para petani, akan menjadi “duri dalam daging” yang justru mengakibatkan kegagalan untuk mendemokratisasikan relasi gender dalam gerakan petani, dan akhirnya akan berpengaruh pula pada *visi* demokratisasi bagi masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

Agenda gerakan petani perempuan untuk merebut wacana globalisasi, perdagangan bebas, *corporate farming*, atapun keamanan dan kedaulatan pangan, untuk kehidupan mereka ternyata masih belum menyentuh wacana gender sebagai *mainstreaming*. Bahkan ada indikasi kuat yang menunjukkan absennya “pertanyaan gender” pada setiap gerakan petani perempuan untuk mempertanyakan bagaimana globalisasi dan perdagangan bebas dibidang pangan, akan berakibat negatif bagi petani perempuan. Dengan kata lain, tanpa mempertimbangkan implikasi gender, suatu perjuangan dan gerakan petani dalam memperjuangkan hak-hak petani, maupun dalam memperjuangkan reformasi agraria, akan melanggengkan ketidakadilan bagi petani perempuan. Bahkan penderitaan yang dialami oleh petani perempuan akibat diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang ditimbulkan akibat dari relasi gender dikalangan petani sama seriusnya dengan yang dirasakan oleh petani perempuan ketika mereka merasakan akibat kejahatan dan kekerasan yang ditimbulkan oleh Neoliberalisme. Oleh karena itu secara simultan, gerakan petani perlu membenahi diri untuk mendemokratisasikan “relasi gender” terutama melakukan proses demokratisasi relasi gender di rumah tangga petani sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gerakan untuk memberdayakan dan mencapai hak-hak petani perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, S. “Globalization, Neoliberalism and The Transformation of the Australian state”. *Australian Journal of Political Science* 32 (3). 1997.
- Chomsky, Noam, *Profit over people, Neoliberalism and Global Order*, New York: Seven Stories press, 1999.
- Dos Santos, T. “The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependency in Latin America”. In Henry Bernstein (Ed.), *Underdevelopment and Development: The Third World Today*, Harmondsworth, England: Penguin, 1976.
- Escobar, A. “Discourse and Power in Development: Michael Foucault and the Relevance in his Work to the Third World”. *Alternatives*, No. X, 1985.
- Gendzier, *Managing Political Change: Social Scientists and the Third World*. Boulder, CO: Westview Press, 1985.
- Gills, S. “Globalization, Market Civilization and Dicyplinary Neoliberalism” *Millenium* 24: 3 399V 423. 1995.
- T. Hayter, *Aid as Imperialism*. Baltimore: Penguin Books Ltd., 1971.
- Laclau, E. & Mouffe, C. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso Editions, 1985.
- C. Payer, *The Debt Trap: The IMF and the Third World*. New York: Monthly Review Press, 1974.
- . “The IMF in the 1980s: What has it Learned; What have We Learned about it?” In Third World Foundation (Ed.), *Third World Affairs 1985*. Boulder, CO: WestView, 1985.
- Sachs, W. (Ed.). *The Development Dictionary, A Guide to Knowledge as Power*, London: Zed Books: 1992.
- Mandy Macdonald, Ellen Sprenger, Ireen Dubel. *Gender & Perubahan Organisasi*, Insist Press Yogya: 1997
- Irene Guijit, *The Myth of Community IDS*: 1998.
- Mansour Fakh, *Gender dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Vandana Shiva, “Gender, Environment, and Sustainable Development” *Jurnal Perempuan*, 1995

